

**MANAJEMEN STAKEHOLDER KELOMPOK SADAR WISATA
DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA
DESA RANCAKALONG SUMEDANG**

Sedrandas Syedira¹, Didiet Widiowati²

Program Studi Pekerjaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

¹sedrandasyedira4860@gmail.com

²didietwidiowati@gmail.com

Abstract

This community service is motivated by the collaboration between the Sumedang Regency Government and the Bandung Social Welfare Polytechnic through the implementation of community-based practicum targeting the Key Performance Indicators (IKU) listed in the Sumedang Regency Regional Development Work Plan concerning four issues, one of which is increasing village competitiveness in the form of one village one product. Based on the potential and assets of the community in the Rancakalong Village area, community service is directed at efforts to develop culture-based tourism. The methods carried out in community service practice are participatory methods, including Focus Group Discussion (FGD), interviews, observations, and documentation studies. Through stakeholder management of tourism awareness groups, service practices are directed to see the extent of the involvement of figures which then emerges the commitment of figures in efforts to develop cultural tourism. The results of this community service activity are in the form of actor quadrant mapping which shows four kinds of stakeholder positions based on their interests and influences, the output of which is in the form of restructuring tourism awareness groups and preparing group work plans.

Keywords: stakeholder management, tourism awareness group, tourism village, community asset.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung melalui pelaksanaan praktikum berbasis komunitas yang menasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang menyangkut empat isu, salah satunya adalah peningkatan daya saing desa berupa one village one product. Berlandaskan pada potensi dan aset komunitas yang ada di wilayah Desa Rancakalong, maka pengabdian masyarakat diarahkan pada upaya pengembangan wisata berbasiske budayaan. Metode yang dilakukan dalam praktik pengabdian masyarakat adalah metode partisipatif, meliputi Focus Grup Discussion (FGD), wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Melalui manajemen stakeholder kelompok sadar wisata, praktik pengabdian diarahkan untuk melihat sejauh mana keterlibatan para tokoh yang selanjutnya munculah komitmen para tokoh dalam upaya pengembangan wisata budaya. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa pemetaan kuadran aktor yang menunjukkan empat macam posisi stakeholders berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya yang outputnya berupa restrukturisasi kelompok sadar wisata dan penyusunan rencana kerja kelompok.

Kata kunci: manajemen stakeholder, kelompok sadar wisata, desa wisata, aset komunitas.

PENDAHULUAN

Desa Rancakalong merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang yang dikenal luas oleh masyarakat dalam dan luar daerah Jawa Barat sebagai desa yang sakral akan kebudayaan sunda. Konon, Desa Rancakalong dianggap sebagai satu-satunya desa yang masih terjaga dan menjaga kesakralan dan kemurnian kebudayaan sunda. Tak hanya itu, bentang alam dan cuaca yang sejuk, serta kuliner tradisional yang khas dan nikmat menjadi daya tarik tersendiri bagi Desa Rancakalong. Hingga pada akhirnya mereka mulai menyadari bahwa itu adalah potensi bagi masyarakat lokal. Terbukti pada 2020 lalu, Desa Rancakalong masuk kedalam 300 besar kategori desa wisata iconic se-Indonesia. Ini menjadi pencapaian pertama Desa Rancakalong dalam upaya pengembangan desa wisata.

Secara fakta, banyak orang mengakui bahwa Desa Rancakalong termasuk desa wisata yang patut untuk dikunjungi. Namun, secara de jure masih belum ada legalitas yang membuktikan bahwa Desa Rancakalong merupakan desa wisata yang terdaftar di dinas terkait. Tak hanya itu, rendahnya kohesivitas dan kesadaran masyarakat akan potensi yang ada membuat wisata budaya yang dulunya sudah dikembangkan menjadi *vacum*. Bahkan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang telah dibentuk pada awal tahun lalu pun tidak menjalankan fungsi dan perannya dikarenakan ada konflik internal yang terjadi didalamnya. Masing-masing tokoh memiliki kepentingannya sendiri, alhasil tidak ada yang berhasil mengembangkan desa wisata. Mirisnya, fasilitas dan sarana prasarana kebudayaan yang telah ada perlahan mulai lapuk, tokoh kesenian mulai *vacum*, minimnya kemauan generasi muda dalam melestarikan kebudayaan setempat, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah terbengkalai.

Manajemen stakeholder adalah serangkaian proses identifikasi, prioritas, dan melibatkan para pemangku kepentingan selama proses pengembangan suatu produk yang sedang berlangsung. Hal tersebut

dilakukan agar para pemangku kepentingan bisa mencapai kata sepakat dengan berbagai persetujuan yang diajukan oleh lembaga. Penekanan strategi ini dilakukan pada pembuatan rencana manajemen yang mampu memetakan tingkat kepentingan serta pengaruh dari tiap-tiap stakeholder yang dibagi ke dalam empat jenis, yaitu :

1. Kuadran 1 (high power-high interest), dimana stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi dan kepentingan yang tinggi. Stakeholder harus dilibatkan sepenuhnya dan diyakinkan bahwa keberhasilan adalah atas hasil dukungan mereka.
2. Kuadran 2 (high power-low interest), dimana stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi, akan tetapi kepentingannya rendah. Stakeholder ini bukanlah yang utama, akan tetapi mereka potensial menjadi oposan.
3. Kuadran 3 (low power-high interest), dimana stakeholder memiliki kekuatan yang tinggi, akan tetapi kepentingannya rendah. Stakeholder ini membutuhkan upaya dan strategi khusus agar mereka yakin bahwa keterlibatan mereka sangat bermakna.
4. Kuadran 4 (low power-low interest), dimana stakeholder memiliki kekuatan yang rendah dan kepentingan yang rendah. Stakeholder ini tetap dilibatkan, akan tetapi tidak diperlukan strategi khusus. Berdasarkan hasil manajemen stakeholder nantinya akan diperoleh pemetaan tentang tingkatan berkomunikasi dengan stakeholder dan bagaimana upaya meningkatkan komitmen dan keterlibatan tiap-tiap stakeholder.

Dewasa ini, program-program pembangunan nasional maupun daerah diarahkan pada tercapainya indikator pembangunan berkelanjutan (SDG's). Mengacu pada tujuh belas indikator pembangunan berkelanjutan yang ada, pendayagunaan aset dan potensi suatu desa untuk mengembangkan sektor pariwisata ternyata selaras dengan beberapa indikator SDG's, yaitu indikator pertama yang berbicara tentang tujuan "Tanpa Kemiskinan"

dan indikator delapan tentang “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melaksanakan praktik pengabdian masyarakat yang berfokus pada manajemen stakeholder kelompok sadar wisata dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan komitmen para tokoh dalam upaya pengembangan wisata berbasis budaya di Desa Rancakalong sebagai upaya peningkatan daya saing desa melalui one village one product berbasis aset komunitas.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara partisipatif, mulai dari tahap dialog unmembangun relasi, discovery (asesmen dan perencanaan intervensi), development (pelaksanaan dan pengembangan intervensi), maupun monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, praktikan menggunakan teknologi/ tools intervensi makro berupa manajemen stakeholder untuk memetakan potensial actor yang memiliki komitmen dalam pengembangan desa wisata budaya. Potensi dan aset komunitas menjadi landasan dalam pengembangan wisata budaya yang dipetakan secara partisipatif bersama tokoh masyarakat melalui tools Sustainability Livelihood Asset (SLA). Kedua teknologi tersebut diaplikasikan melalui kertas plano, metacard, pembuatan booklet, dan alat tulis lainnya yang mendukung proses diskusi kelompok. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, community involvement, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Indikator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah terlaksananya manajemen stakeholder mulai dari mengidentifikasi stakeholder yang telah dan akan dilibatkan, merencanakan manajemen stakeholder, mengelola keterlibatan stakeholder, serta mengendalikan keterlibatan stakeholder dengan harapan terjalinnya relasi, terbitnya legalitas desa wisata, pendampingan oleh mitra, serta perumusan rencana kerja Pokdarwis.

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kelompok sadar wisata Desa Rancakalong pertama kali dibentuk pada Januari 2023, akan tetapi pada kenyataannya mereka belum menjalankan peranan dan fungsinya sejak awal terbentuk yang disebabkan oleh konflik yang terjadi dalam keanggotaannya, sehingga penulis memfasilitasi forum pertemuan pengurus Pokdarwis dan aparat desa. Rembug ini membahas tentang konflik-konflik yang terjadi di internal Pokdarwis, meliputi pencantuman nama di SK secara sepihak, adanya vested interest antar tokoh, serta Pokdarwis yang belum merepresentasikan elemen-elemen tokoh di masyarakat. Melalui pemetaan kuadran aktor, maka para stakeholder dipetakan menjadi empat posisi, yaitu :

1. Kuadran pertama meliputi Kepala Desa, BUMDes, dan BPD.
2. Kuadran kedua meliputi tokoh budaya, pelaku UMKM, dan tokoh pemuda.
3. Kuadran ketiga meliputi tokoh pemuda.
4. Kuadran 4 meliputi Linmas.

Hasil akhir dari rembug ini adalah berupa keputusan pelibatan berbagai tokoh masyarakat dalam keanggotaan Pokdarwis yang tentunya menciptakan perubahan dan kebaruan pada Surat Keputusan (SK) anggota Pokdarwis.

Tak lengkap rasanya jika suatu desa wisata tidak memiliki legalitas. Berbicara tentang legalitas desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketercantuman desa wisata di dinas terkait, akan tetapi juga sebagai modal dalam upaya mencari dukungan materiil dan non-materiil. Berlandaskan pada usulan para tokoh budaya dan anggota Pokdarwis lainnya, serta dorongan dari penulis, akhirnya mereka sepakat untuk menjalin kemitraan mencanangkan Desa Rancakalong sebagai desa wisata berbasis budaya ke Disbudparpora Kabupaten Sumedang. Peran representatif dan broker seorang community development worker dimainkan dalam hal ini, di mana penulis menjadi penghubung bagi Pokdarwis dalam membangun relasi dengan Disbudparpora Kabupaten

url: <http://lpm.unla.ac.id/ojs/index.php/tribhakti>

Sumedang. Terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi sebagai persyaratan pencanangan legalitas desa wisata, yaitu SK pencanangan desa wisata oleh kepala desa, SK Pokdarwis, berita acara pengesahan Pokdarwis, surat pengantar dari desa ke Disbudparpora, profil desa wisata, dokumen pemetaan dan rencana pengembangan aset komunitas/ wilayah. Dalam menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut, penulis menggunakan teknologi Sustainability Livelihood Asset (SLA) yang dipetakan secara partisipatif bersama Pokdarwis. Adapun hasil dari pemetaan aset komunitas melalui SLA meliputi :

1. Natural Capital meliputi pesona alam Desa Rancakalong yang sangat subur dan potensial seperti persawahan yang luas melintang, kawasan hutan pinus, pasir angin dan kawasan perkemahan, serta pendopo atau sanggar budaya.
2. Social Capital meliputi nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, seperti kekeluargaan yang tinggi yang mengikat satu sama lain, kebudayaan sakral sunda yang masih dipegang dan dijaga oleh masyarakat diantaranya ngalaksa, bubur suro, kuda renggong, rengkong, sholawat mulud (terebang), dan kesenian lainnya.
3. Financial Capital meliputi dana desa, dukungan dari stakeholder dan

shareholder yang berpotensi untuk merefungsionalisasi desa wisata melalui dukungan materiil maupun non-materiil.

4. Physical Capital meliputi infrastruktur desa yang sangat mendukung pengembangan kembali desa wisata, mulai dari hunian warga yang bernuansa desa, terminal, jalan, pusat oleh-oleh (pelaku UMKM), fasilitas ibadah, dan fasilitas publik lainnya.
5. Human Capital meliputi tokoh budaya yang menjaga kelestarian dan kesakralan budaya sunda, pelaku UMKM sebagai penggerak perekonomian, BUMDes yang mengayomi kegiatan perekonomian masyarakat, pihak desa, dan dinas terkait lainnya.

Dalam upaya implementasi manajemen stakeholder, ada beberapa hal yang dilakukan dalam praktiknya, mulai dari mengidentifikasi stakeholder dan konflik yang terjadi didalamnya, merencanakan manajemen stakeholder melalui FGD dan diskusi face-to-face bersama stakeholder, mengelola keterlibatan stakeholder berdasarkan potensi pengembangan masing-masing stakeholder, serta mengendalikan keterlibatan stakeholder. Berikut merupakan ringkasan upaya manajemen stakeholder yang dilakukan.

Tabel 1. Ringkasan Upaya Manajemen Stake Holder

Kegiatan (1)	Tujuan (2)	Teknologi/ Taktik yang Digunakan (3)	Sasaran (4)	Waktu (5)
Manajemen Stakeholder Pokdarwis	-Meredam konflik yang terjadi -Merevitalisasi struktur Pokdarwis agar lebih representatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat -Memunculkan komitmen para stakeholder	Cooptation (taktik) Diskusi terfokus Manajemen stakeholder	Tokoh budaya, BUMDes, BPD, tokoh pemuda, pelaku UMKM, dan Kepala Desa Rancakalong.	17 November 2023
Pemetaan aset komunitas (social mapping)	-Terpetakannya aset community development (ABCD) yang akan menjadi daya jual wisata budaya	Sustainability Livelihood Asset (SLA)	Bentang alam Desa Rancakalong	17-25 November 2023

Kegiatan (1)	Tujuan (2)	Teknologi/ Taktik yang Digunakan (3)	Sasaran (4)	Waktu (5)
	-Memenuhi salah satu kelengkapan dokumen ajuan legalitas			
Menjalin kemitraan dengan Disbudparpora Kabupaten Sumedang	Memperoleh dukungan materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak	Kolaborasi dengan menjalin kemitraan	Pokdarwis dan Disbudparpora Kabupaten Sumedang	24 November 2023
Penyusunan dokumen pencanangan legalitas wisata budaya	-Memperoleh dukungan materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak -Pengakuan secara <i>de facto</i> dan <i>de jure</i>	Partisipasi (seluruh elemen Pokdarwis dan Pemerintah Desa Rancakalong)	Pokdarwis dan Pemerintah Rancakalong	25 November 2023 – 02 Desember 2023
Penyusunan rencana kerja Pokdarwis	Membantu Pokdarwis dalam langkah awal pengembangan wisata budaya	Kolaborasi dalam pemberdayaan yang partisipatif		03-04 Desember 2023
Pembuatan plang absensi digital pengunjung	Membantu Pokdarwis dalam merekap data pengunjung	Kolaborasi melalui <i>Capacity Building</i>	Pokdarwis dan pengunjung	03 Desember 2023
Pembinaan awal oleh Disbudparpora Kabupaten Sumedang sekaligus penyerahan dokumen legalitas wisata budaya	-Pokdarwis dapat memahami peranannya dalam upaya pengembangan wisata budaya -Wisata budaya Desa Rancakalong memiliki legalitas yang jelas untuk mempermudah pencariam dukungan materiil dan non-materiil	Kolaborasi melalui <i>Capacity Building</i>	Pokdarwis	04 Desember 2023

Adapun hasil dari pelaksanaan praktik intervensi dan pengembangannya adalah sebagai berikut.

1. Stakeholder menunjukkan kesungguhan dan komitmennya dalam mengembangkan desa wisata berbasis budaya.
2. Manajemen konflik dapat diatasi yang dibuktikan dengan peningkatan kohesivitas dan solidaritas kelompok sadar wisata.
3. Perubahan SK anggota Pokdarwis dengan adanya tambahan anggota, yaitu BUMDes, BPD, dan pelaku UMKM yang tentunya akan berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
4. Tersusunnya dokumen persyaratan

pencanangan legalitas desa wisata, yaitu SK pencanangan desa wisata oleh kepala desa, SK Pokdarwis, berita acara pengesahan Pokdarwis, profil desa wisata, dokumen pemetaan dan rencana pengembangan aset komunitas/ wilayah, serta surat pengantar dari desa ke Disbudparpora.

5. Terbentuknya plang absensi digital pengunjung desa wisata budaya yang dipasang di pintu masuk menuju lokasi wisata .
6. Tersusunnya rencana kerja Pokdarwis dengan membentuk paket-paket wisata, yaitu:
 - a. Paket A (tanpa menginap) dengan fasilitas pertunjukan satu jenis

kebudayaan yang bisa dilaksanakan harian/mingguan, serta wisata kuliner (tahu sumedang, ubi cilembu, dan sampeu wedang).

- b. Paket B (menginap di homestay dua hari satu malam) dengan fasilitas pertunjukan satu jenis kebudayaan yang bisa dilaksanakan harian/mingguan, wisata kuliner (tahu sumedang, ubi cilembu, dan sampeu wedang).
- c. Paket C (menginap di homestay dua hari satu malam) dengan fasilitas pertunjukan satu jenis kebudayaan yang bisa dilaksanakan harian/mingguan, wisata kuliner (tahu sumedang, ubi cilembu, dan sampeu wedang), serta paket perjalanan ke area persawahan untuk menikmati nasi liwet/ nasi timbal.

Pembahasan

Upaya perubahan yang dilakukan telah dideskripsikan secara detail tentang bagaimana langkah-langkah dan proses tahapan manajemen stakeholder, misalnya pada tahap identifikasi stakeholder, bagaimana peneliti memperoleh gambaran siapa saja stakeholder yang dibutuhkan lalu menganalisis seluruh stakeholder yang terlibat berdasarkan power/interest yang dimiliki dan mengidentifikasi masalah yang telah ada atau potensi masalah yang ditemukan. Berikutnya, pada tahap perencanaan manajemen stakeholder adalah meramu strategi yang tepat dalam melakukan strategi pendekatan dan teknik komunikasi yang tepat sesuai dengan tingkat

dampak keterlibatan tiap stakeholder terhadap program dan menyusun rencana penyelesaian masalah. Tahap selanjutnya adalah mengelola keterlibatan seluruh stakeholder. Sesuai dengan rencana manajemen stakeholder yang telah dibuat, dalam tahap ini peneliti menyelesaikan masalah yang ada dan melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah yang akan muncul kembali, serta memenuhi seluruh kebutuhan yang menjadi harapan tiap-tiap pemangku kepentingan. Tahap terakhir adalah mengendalikan keterlibatan stakeholder yang bertujuan untuk memastikan dan memantau keterlibatan stakeholder dalam program, dan sebisa mungkin mengalami peningkatan tingkat keterlibatan mereka kedalam program pemberdayaan untuk meningkatkan keberhasilan program.

Implementasi dari berbagai metode dan teknik yang digunakan dalam menerapkan manajemen stakeholder dirasa sudah diterapkan dengan baik. Hal ini berdasarkan tercapainya tujuan manajemen stakeholder yang secara keseluruhan telah terpenuhi, baik secara tahapan maupun hasil dari tiap tahapan.

Secara lebih luas, praktik manajemen stakeholder kelompok sadar wisata dalam mengembangkan wisata budaya Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang juga berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development Goals).

Berikut merupakan analisis kontribusi program yang dilakukan oleh praktikan terhadap Indikator Pembangunan Keberlanjutan.

Tabel 2. Analisis Kontribusi Program

Program (1)	Tujuan Program (2)	Tujuan SDG's (3)	Target SDG's (4)
Manajemen Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Budaya Desa Rancakalong	Mengalokasikan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Rancakalong		1.a.1. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

Program (1)	Tujuan Program (2)	Tujuan SDG's (3)	Target SDG's (4)
	Meningkatkan daya saing desa melalui <i>one village one product</i>		8.9.1. Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan		8.3.1. Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan “Manajemen Stakeholder Kelompok Sadar Wisata dalam Mengembangkan Wisata Budaya Desa Rancakalong Kabupaten Sumedang” telah mampu menghasilkan perubahan di masyarakat Desa Rancakalong. Manajemen stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Manajemen stakeholder merupakan penjabaran detail terkait bagaimana pekerja sosial memainkan peran dengan berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, atau menghubungkan klien dengan sistem sumber, atau yang disebut dengan peran representatif. Disamping itu, pekerja sosial juga memainkan peranan advokasi dalam upaya pengusulan legalitas wisata agar dapat memperoleh dukungan yang nyata dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi penulis yang berlandaskan pada pelibatan multi-stakeholder, yaitu : pembinaan lebih lanjut oleh Disbudparpora Kabupaten Sumedang kepada Pokdarwis Desa Rancakalong untuk mengoptimalkan upaya pengembangan wisata budaya; Pokdarwis Desa Rancakalong dapat menjalin dan memperluas jejaring dan kemitraan untuk memperoleh dukungan materiil dan non-materiil; dan engimplementasian rencana kerja Pokdarwis yang telah dibuat.

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, cet. ke-1
- Desiati, Rosita. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Program Desa Wisata, Dalam Jurnal Ilmiah DIKLUS (edisi XVII, No.01
- Evy Nurfiana. 2013. Analisis Dampak Ekonomi dan Lingkungan Kegiatan dan Pariwisata Provinsi Banten. di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Terhadap Masyarakat sekitar. Skripsi, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Global Sustainability Consultancy and Standards, diakses melalui <https://www.accountability.org/standards/aa1000-assurance-standard/>
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad. 2007. Analisis Para Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian, Bogor. Jurnal Litbang Pertanian. Vol.26,No.3:89-99.
- Jabrohim. 2004. Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat. UAD.
- Martono, Edi dan Muhammad, 2017.

url: <http://lpm.unla.ac.id/ojs/index.php/tribhakti>

- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya terhadap Wisata. Vol.23, No.1
- Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. 2019. Pedoman Desa Wisata. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1 tahun 2021
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sugianto, Alip. 2016. Kajian Potensi Desa Wisata sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Ponorogo. Jurnal Moderat. Volume 11
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Suwantoro, G. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Wijaya, Chandra.2017. Perilaku Organisasi. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia ; Medan
- Zulfikar, Muamar. 2013. Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Alam di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Institut Pertanian Bogor.